

Volume 10 Nomor 1 April 2025  
E-ISSN 2541-0938 P-ISSN 2657-1528

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI  
**JURKAMI**

**JURKAMI**

VOLUME 10  
NOMOR 1

SINTANG  
APRIL  
2025

DOI  
10.31932

E-ISSN  
2541-0938  
P-ISSN  
2657-1528

## DEWAN REDAKSI

Yunita Astikawati, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia (Editor in Chief)  
Aditya Halim Perdana Kusuma, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.  
Aniek Hindrayani, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.  
Anna Marganingsih, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia.  
Dessy Triana Relita, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia.  
Diyah Santi Hariyani, Universitas PGRI Madiun, Indonesia.  
Emilia Dewiati Pelipa, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia.  
Fitria Fitria, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia.  
Husni Syahrudin, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia.  
Inda Fresti Puspitasari, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.  
Maria Ulfah, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia.  
Nikmatul Masrurroh, FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia.  
Nuraini Asriati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Indonesia.  
Rio Nardo, Universitas Binawan, Indonesia.  
Sri Mulyati, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fkip Universitas Kuningan, Indonesia  
Suwinto Johan, President University, Indonesia.  
Yulia Suriyanti, Pendidikan Ekonomi, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia.

## TIM REVIEWER

Abdul Mujib, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia  
Abdul Samad, Universitas Fajar, Indonesia.  
Abdul Wahab, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.  
Bambang Ismanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia  
Dadang Lesmana, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kutai Timur, Indonesia.  
Dewi Kusuma Wardani, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
Dicki Hartanto, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.  
Dudung Ma'ruf Nuris, Universitas Negeri Malang, Indonesia.  
Eko Eddy Supriyanto, STKIP Nahdlatul Ulama Tegal, Indonesia.  
Febrianty Febrianty, Politeknik PalComTech, Indonesia.  
Muhammad Syaiful, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia.  
Mohammad Hamim Sultoni, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia.  
M Dana Prihadi, Poltekkes YBA Bandung, Indonesia.  
M. Rudi Irwansyah, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia.  
Muh. Fahrurrozi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia.  
Muhammad Hasan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.  
Muhammad Ihsan Said Ahmad, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.  
Muhammad Rahmattullah, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.  
Reni Yuliviona, Universitas Bung Hatta, Indonesia.  
Rhini Fatmasari, Universitas Terbuka, Indonesia.  
Sodik Dwi Purnomo, Universitas Wijaya kusuma Purwokerto, Indonesia.  
Sugiharsono, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.  
Suratno Suratno, Universitas Jambi, Indonesia.  
Tutut Suryaningsih, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Indonesia  
Umi Kalsum, Universitas Sriwijaya, Indonesia.  
Yapiter Marpi, Universitas Jakarta, Indonesia.  
Zulfia Hanum Alfi Syahr, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia.

### Alamat Redaksi:

Jln. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Email: [jurnaljurkami@gmail.com](mailto:jurnaljurkami@gmail.com)

Penerbit: LPPM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN  
DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DI KOTA BANDUNG (2013-2022)**

**Lisa Nursita**<sup>✉</sup>, **Marwiyah Windah Wael**<sup>2</sup>, **Dewi Amanda**<sup>3</sup>, **Rema Wahyuni**<sup>4</sup>, **Muhammad Amri**<sup>5</sup>  
Program Studi Manajemen, Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar, Indonesia<sup>12345</sup>

<sup>✉</sup>Corresponding Author Email: [lisa.nursita@uin-alauddin.ac.id](mailto:lisa.nursita@uin-alauddin.ac.id)

Author Email : [windahwael@gmail.com](mailto:windahwael@gmail.com)<sup>2</sup>, [dewiamanda124@gmail.com](mailto:dewiamanda124@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[wahyunirema180@gmail.com](mailto:wahyunirema180@gmail.com)<sup>4</sup>, [muhhammadamri57878@gmail.com](mailto:muhhammadamri57878@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract:**

*Article History:*  
*Received: June 2024*  
*Revision: December 2024*  
*Accepted: January 2025*  
*Published: April 2025*

*Keywords:*  
*Government Expenditures, Education, Health, HDI*

*In the midst of the dynamics of the country's development, the Human Development Index (HDI) is an important indicator for measuring the success and quality of people's lives. This research aims to determine and analyze the influence of government spending in the education and health sectors on the Human Development Index (HDI) in Bandung City in 2013-2022. In this research, the method used is multiple linear regression. Based on the research results, it shows that the Bandung city government's partial expenditure on the education sector and government expenditure on the health sector have a positive and significant effect on HDI. Then, simultaneously or concurrently, government spending on education and health has a significant effect on the HDI in the Bandung City sector in the 2013-2022 period. Budget allocation policies, especially in the Education and Health sectors, have increased which has resulted in the human development index in the city of Bandung also increasing every year. Government budget allocations in education aim to increase access to knowledge and skills, while spending on health aims to provide access to health services to improve community welfare. Both contribute to increasing the human development index in Bandung City.*

**Abstrak:**

*Sejarah Artikel*  
*Diterima: Juni 2024*  
*Direvisi: Desember 2024*  
*Disetujui: Januari 2025*  
*Diterbitkan: April 2025*

*Kata kunci:*  
*Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, IPM*

Di tengah dinamika pembangunan negara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandung pada tahun 2013-2022. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara parsial pengeluaran pemerintah kota Bandung pada sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah pada sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kemudian secara simultan atau bersamaan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM Kota Bandung pada periode 2013-2022. Kebijakan pengalokasian anggaran khususnya pada sektor Pendidikan dan Kesehatan mengalami peningkatan yang mengakibatkan indeks Pembangunan manusia di kota bandung setiap tahun juga ikut meningkat. Alokasi anggaran pemerintah dalam pendidikan bertujuan meningkatkan akses pengetahuan dan keterampilan, sementara pengeluaran dalam kesehatan bertujuan memberikan akses layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di kota Bandung.



*How to Cite:* Lisa Nursita, Marwiyah Windah Wael, Dewi Amanda, Rema Wahyuni, Muhammad Amri. 2025. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung (2013-2022)*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 10 (1) DOI : DOI : [10.31932/jpe.v10i1.3392](https://doi.org/10.31932/jpe.v10i1.3392)

## PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa dan negara ditunjang oleh pembangunan dan pertumbuhan berbagai sektor kehidupan. Menurut Santoso dan Kharisma dalam Nahwan (2023), sektor ekonomi merupakan kunci pencapaian kemakmuran, stabilitas dan kemandirian bangsa. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, maka sumber daya manusia harus baik pula. Pertumbuhan sektor ekonomi harus sejalan dengan pembangunan manusia sebagai pelakunya. Pembangunan secara umum dimaknai sebagai usaha mewujudkan kemajuan bangsa dengan taraf hidup yang lebih baik. Sebelum tahun 1970, pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi sebagian besar penduduknya tidak memiliki taraf hidup yang baik (Yuliani, 2021). Pada akhir tahun 1970 sampai awal 1980-an, dunia dilanda resesi ekonomi, akibat resesi ekonomi tersebut melahirkan kebijakan desentralisasi fiskal sebagai upaya perbaikan kondisi ekonomi, yang merupakan devolusi kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai sarana peningkatan efisiensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Nanga & Hudang, 2023). Selain kebijakan desentralisasi fiskal, resesi ekonomi juga mendorong lahirnya konsep pembangunan manusia sebagai upaya perbaikan kelemahan pertumbuhan

ekonomi yang tidak hanya memperhatikan aspek pendapatan, tetapi juga memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia dimulai sejak memasuki era reformasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, UU RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami revisi terakhir dengan UU RI Nomor 23 tahun 2014, yang berisi pemberian keluasaan wewenang pada daerah, yang mana semua urusan pemerintahan merupakan urusan pemerintah daerah, dan pada pasal 11 UU Nomor 22 tahun 1999 menyatakan “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja” (R. Indonesia, 2023). Kebijakan desentralisasi melimpahkan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Safitri, 2022). Pemerintah pusat menjamin sumber keuangan lewat APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengelola anggaran tersebut ke beberapa pos anggaran, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang nantinya akan dikelola daerah untuk pembangunan daerahnya. Menurut Sadono Sukirno dalam Aulia *et al.*, (2023) pengeluaran pemerintah merupakan tindakan mengelola jalannya perekonomian dengan menentukan besaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahun. Desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan daerah untuk merancang kebijakan daerah yang sesuai



dengan kebutuhan dan kondisi daerah, serta mampu meningkatkan layanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan (Kaadafi *et al.*, 2023).

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi manifestasi negara dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Kualitas manusia dianggap baik jika pendidikan dan kesehatannya dalam kondisi yang maksimal. Dengan pendidikan yang layak, maka mempunyai daya pikir yang lebih baik dan menjadikan manusia yang kreatif, sederhanya kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Kesehatan yang baik mengakibatkan daya fisik manusia menjadi optimal, dapat bekerja lebih lama dan dengan beban yang lebih besar (Nursita & Edy, 2022). Pendidikan dipandang sebagai pondasi sumber daya manusia yang unggul, karena jika masyarakat dalam suatu negara tidak berpendidikan, maka negara akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan serangkaian usaha terstruktur, terencana dan berkelanjutan dalam membina manusia menjadi individu yang lebih baik dalam menjalani kehidupan sebagai tujuannya (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Lewat pendidikan, masyarakat menjadi individu yang bernilai dan memiliki kompetensi untuk bersaing secara positif dengan individu lain sehingga mampu mensejahterakan kehidupannya, dan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Meningkatnya taraf hidup masyarakat berdampak pada pembangunan berbagai sektor yang ikut meningkat. Keberhasilan pembangunan manusia lewat pendidikan tidak terlepas dari manifestasi pembangunan manusia lewat sektor kesehatan. Hal tersebut

dikarenakan pendorong produktivitas individu, keluarga, serta pendidikan berawal dari kesehatan. Setiap aktivitas dapat dijalankan dengan baik jika jasmani dan rohani sehat (Aurelya *et al.*, 2022). Bahkan beberapa ahli ekonomi memandang kesehatan sebagai fenomena ekonomi, baik sebagai investasi maupun variabel stok yang mempengaruhi nilai tambah produksi barang dan jasa (Kaadafi *et al.*, 2023). Negara perlu menginvestasikan sejumlah anggaran pada kedua sektor tersebut, agar negara bisa tumbuh lewat pembangunan manusia yang berkualitas. Kebijakan Indonesia dalam menyikapi urgensi pendidikan dan Kesehatan dalam pembangunan manusia untuk memajukan negara dengan menetapkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat 4 yang mengatur alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD (P. P. Indonesia, 2003). Sementara untuk sektor kesehatan ditetapkan dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% dari APBD (P. P. Indonesia, 2009). Atas kebijakan desentralisasi fiskal, maka setiap daerah di Indonesia memegang peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat di daerah untuk bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses kesehatan yang baik, maka setiap daerah perlu mengelola anggaran daerahnya secara bijak, dengan harapan terpenuhinya pembangunan manusia yang merata. Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penyusun pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diperkenalkan pertama kali oleh United Nations Development Program (UNDP) tahun 1990. Gagasan ini muncul sebagai pandangan bahwa manusia merupakan tujuan akhir pembangunan dalam menciptakan lingkungan yang produktif sehingga hidup sehat dan umur panjang, bukan hanya sebagai input (Karyono *et al.*, 2020). Untuk mengukur pembangunan



manusia, diperkenalkan satu pendekatan yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah pendekatan pengukuran keberhasilan pembangunan manusia yang meliputi 3 aspek mendasar, yaitu kesehatan, pendidikan dan kehidupan layak (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Tingginya IPM suatu negara atau daerah menjadi indikasi keberhasilan serta keseriusan pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun daerahnya serta negara (Rahmah *et al.*, 2023). Komponen IPM yang membangun aspek kesehatan yaitu usia harapan hidup, sedangkan komponen aspek pendidikan meliputi harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah. Adapun aspek kesejahteraan ditinjau dari komponen pengeluaran perkapita. Dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, untuk membangun negara yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan industri yang siap bersaing, maka perhatian dan keseriusan dalam peningkatan pembangunan manusia menjadi penting. Dewasa ini desentralisasi fiskal menjadi pilihan dalam pelaksanaan kebijakan dan pemputusan kewenangan karena setiap daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerahnya, termasuk di Indonesia. Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya termasuk dalam upaya pembangunan manusia. Setiap tahun APBD mengalami peningkatan dan IPM juga ikut meningkat, meskipun terdapat peningkatan yang tidak terlalu jauh berbeda. Berdasarkan hal tersebut dapat

diasumsikan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi IPM, untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan mempengaruhi IPM, berikut beberapa ahli telah melakukan penelitian terkait pengaruh pengeluaran pemerintah dan faktor lainnya terhadap IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia *et al.*, (2023) di Kota Mataram periode 2012-2021 yang menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil uji F menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan Muhammad & Rahmi (2023), dengan objek penelitian di Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap IPM Provinsi Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan Pramestry & Marseto (2022) di Kabupaten Jombang, dengan analisis linear berganda menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi IPM, tetapi produk domestik regional bruto mempengaruhi IPM secara signifikan. Uji t pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahuze *et al.*, (2022) di Kabupaten Boven Digoel, mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Penelitian yang dilakukan Kaadafi *et al.*, (2023) di Kota Langsa yang menggunakan uji t menunjukkan hasil berbeda, penelitian ini menunjukkan pengaruh positif pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Beragamnya hasil penelitian terdahulu disebabkan faktor data yang diperoleh, objek penelitian, periode



data yang digunakan dan variabel yang digunakan.

Adapun penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung pada tahun 2013-2022. Lewat penelitian ini dapat diketahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah Kota Bandung terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Bandung, sehingga bisa dijadikan rujukan pengambilan kebijakan daerah dan penambah referensi mengenai pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta IPM terkhusus di Kota Bandung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Kota Bandung tahun 2013-2022. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang sifatnya inferensial, dalam artian pengambilan kesimpulan didasari hasil uji hipotesis secara statistik dengan data empirik dan dilakukan pengukuran pada data hasil pengumpulannya (Djaali, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui dokumen atau survei yang dilakukan orang lain yang bentuknya time series (kurun waktu) tahun 2013-2022. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistika) Kota Bandung, laporan

realisasi anggaran Dinas Pendidikan pemerintah Kota Bandung, data APBD kota Bandung, dan laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan kota Bandung, data APBD kota Bandung. Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi menurut Sugiyono (2018) adalah cara pengumpulan data yang berbentuk arsip, dokumen gambar dan tulisan angka serta laporan yang mendukung penelitian. Data dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji koefisien regresi parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dilakukan pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan ( $X_1$ ), variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ( $X_2$ ) dan variabel indeks pembangunan manusia ( $Y$ ). Data variabel  $X_1$  dan  $X_2$  diambil dari data perhitungan APBD Kota Bandung sektor pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 dan untuk variabel  $Y$  berdasarkan pengukuran dari hasil survei yang telah dilakukan BPS Kota Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan suatu negara. Peran pendidikan sebagai landasan utama kemajuan sosial, ekonomi dan politik tidak bisa diabaikan. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, negara-negara yang mencapai pembangunan berkelanjutan seringkali didorong oleh sistem pendidikan yang kuat dan efektif. Pemerintah sebagai garda depan perencanaan dan implementasi kebijakan, memahami betapa pentingnya pendidikan dalam pembangunan manusia demi membentuk masa depan negara yang maju. Itu sebabnya pemerintah mengambil langkah serius dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk berinvestasi di sektor pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya berarti pemenuhan



hak setiap orang atas pendidikan, namun juga merupakan investasi strategis untuk menciptakan nasib positif dalam pembangunan manusia yang secara data dapat diamati lewat indeks pembangunan manusia di negara tersebut. Ini sejalan dengan yang dikatakan Rahim *et al.*, (2021) bahwa untuk meningkatkan IPM negara harus menginvestasikan dan yang cukup untuk pendidikan. Dengan

lahirnya kebijakan desentralisasi tentu setiap daerah memiliki hak dalam mengelola keuangan daerahnya pada setiap sektor kehidupan. Kota Bandung turut berinvestasi pada pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat Bandung. Hal ini dapat diketahui melalui laporan realisasi anggaran pendidikan Kota Bandung yang tersaji sejak tahun 2013-2022 pada tabel 1.

**Tabel 1: Realisasi Anggaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kota Bandung tahun 2013-2022**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan (Rupiah)
2013	Rp262,569,106,396.00
2014	Rp253,293,250,865.00
2015	Rp235,854,600,862.00
2016	Rp263,256,480,390.00
2017	Rp134,496,298,610.00
2018	Rp1,624,696,964,375.00
2019	Rp1,217,206,616,275.00
2020	Rp1,941,973,578,345.00
2021	Rp1,944,355,029,229.00
2022	Rp2,033,987,074,760.00

Sumber: Data APBD Kota Bandung

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah kota, data APBD Kota Bandung, pengeluaran pemerintah Kota Bandung dalam menginvestasikan sejumlah anggaran pada sektor pendidikan pada tahun 2013-2022 berbeda-beda dan mengalami naik turun. Jumlah pengeluaran pemerintah terendah di bidang pendidikan yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp.262.569.106.396,00 sedangkan jumlah pengeluaran pemerintah tertinggi di bidang pendidikan yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp.2.033.987.074.760,00.

Selain Pendidikan, kesehatan dipandang sebagai salah satu faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap pembangunan bangsa. Kesehatan bukan hanya sebagai sebuah investasi, namun sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi, maka keberlangsungan dan kemajuan masyarakat sangat bergantung pada kualitas kesehatan masyarakat yang termasuk di dalamnya. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana yang cukup dan tepat sasaran pada sektor kesehatan. Dengan anggaran yang cukup, ketersediaan



pelayanan kesehatan yang berkualitas, pelatihan tenaga medis, dan distribusi obat dan vaksin yang memadai dapat terjamin. Penganggaran terhadap kesehatan dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang dan kebutuhan untuk mencapai keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Sejalan dengan pendapat Mongan (2019) bahwa kecukupan dana untuk pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan program kesehatan memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini termasuk akses ke posiandu, imunisasi, langkah preventif

dan pengobatan penyakit menular, serta program kesehatan reproduksi. Dengan meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan, maka angka kematian ibu dan bayi dapat menurun, dan masyarakat dapat lebih sehat dan produktif sehingga dapat meningkatkan IPM. Alokasi anggaran sektor kesehatan di Kota Bandung tidak sama setiap tahunnya, dikarenakan pendapatan daerah dan negara yang berbeda-beda, serta kebutuhan yang berbeda untuk setiap tahun anggaran. Untuk mengetahui anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kota Bandung pada tahun 2013-2022 maka tersaji pada tabel 2 yang disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah pada sektor kesehatan Kota Bandung.

**Tabel 2: Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kota Bandung tahun 2013-2022**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan (Rupiah)
2013	Rp218,353,767,264.00
2014	Rp259,756,694,765.00
2015	Rp386,664,487,144.00
2016	Rp486,621,937,530.00
2017	Rp656,635,948,942.75
2018	Rp612,644,868,545.00
2019	Rp642,239,123,267.00
2020	Rp1,117,669,463,697.00
2021	Rp1,185,316,249,041.00
2022	Rp1,011,437,503,252.00

Sumber: APBD Kota Bandung

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tahun 2013-2022 mengalami naik turun. Jumlah pengeluaran

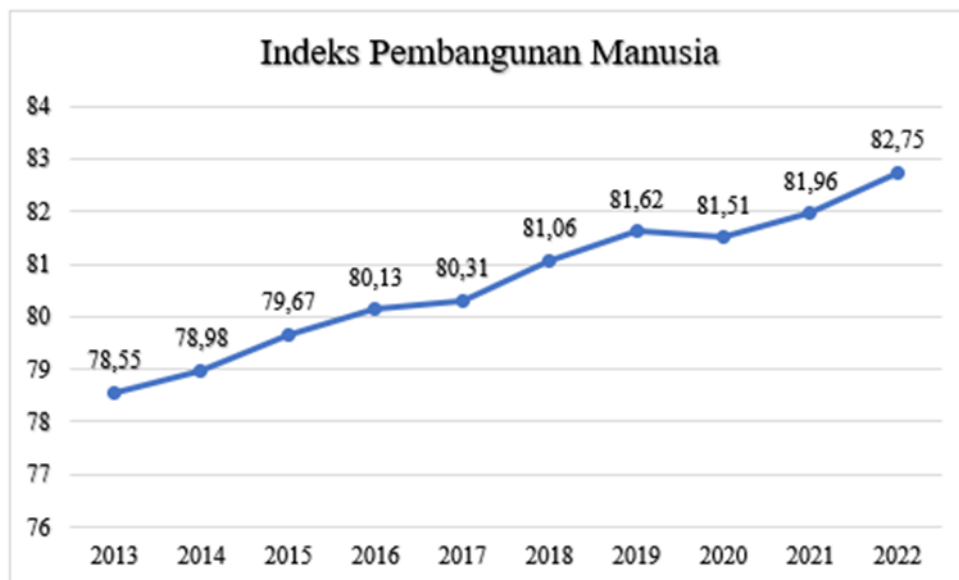
pemerintah terendah di sektor kesehatan yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp218.353.767.264,00 sedangkan jumlah pengeluaran pemerintah tertinggi di sektor



kesehatan yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp1.011.437.503.252,00.

Pengalokasian dana oleh pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan merupakan strategi yang diarahkan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM berfungsi sebagai penentu prioritas pembangunan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang memerlukan perhatian lebih, sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi

tetapi juga pemberdayaan masyarakat di semua lapisan. Data IPM memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana kebijakan dan program pembangunan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Pemerintah dapat lebih efektif menyesuaikan strategi pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat. IPM Kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 sempat mengalami penurunan namun bisa ditingkatkan kembali pada tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik kenaikan IPM kota Bandung yang tersaji pada gambar 1.



**Gambar 1: Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung tahun 2013-2022**

Sumber: Publikasi BPS Kota Bandung

Berdasarkan publikasi BPS Kota Bandung, IPM di Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah Kota Bandung sudah menunjukkan hasil yang maksimal dalam peningkatan angka IPM di Kota Bandung.

Adanya peningkatan IPM Kota Bandung, tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Nur Baeti

dalam Fajri (2021) bahwa IPM berguna untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan modal manusia dan pembangunan manusia menjadi komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduknya dalam meningkatkan kehidupan dasar manusia, pembangunan yang dimaksud sebelumnya dihitung dari ukuran besar dan kecil angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Pemerintah daerah Kota Bandung berperan dalam peningkatan kehidupan dasar warga Bandung melalui pengalokasian anggaran pada

sektor pendidikan dan kesehatan. Pengukuran IPM disusun dalam beberapa indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), harapan lama sekolah, rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata lama sekolah tentu perlu ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang baik dan merata, sehingga penting untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Bandung mengeluarkan anggaran pada sektor pendidikan, sebagai upaya peningkatan produktivitas masyarakat. Sama halnya pada sektor kesehatan, peningkatan angka harapan hidup didukung oleh upaya pemerintah dalam mengeluarkan anggaran dengan tujuan peningkatan derajat kesehatan di daerahnya. Berdasarkan hal tersebut, dan beberapa perbedaan hasil penelitian

terdahulu, menjadi alasan peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan mempengaruhi peningkatan IPM di Kota Bandung pada tahun 2013 sampai 2022.

Untuk melakukan analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Kota Bandung tahun 2013-2022, maka dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji data yang diperoleh. Menurut Suhendi & Astuti (2023) masalah Normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi adalah beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar estimator valid dan dapat dipercaya. Data yang sudah melalui uji asumsi klasik, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda sehingga menghasilkan data yang tersaji pada tabel 3.

**Tabel 3: Pengaruh Pengeluaran pemerintah di bidang Pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang Kesehatan terhadap Indeks pembangunan manusia**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.
C	26.432	7.170	3.686	0.008
X <sub>1</sub>	0.405	0.198	2.046	0.080
X <sub>2</sub>	1.597	0.374	4.271	0.004
R-squared				0.916
Adjusted R Square				0.892
S.E of Regression				0.444
Mean Dependent var				7.568
S.D. dependent var				0.392
F-Statistic				38.28
Prob (F-Statistic)				0.000
Durbin-Waston stat				2.169

Sumber: Data diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel hasil pengelolaan di atas, diketahui bahwa fungsi persamaan sebagai berikut.

$$Y = 26,432 + 0,405 X_1 + 1.597 X_2 \quad (1)$$

Hasil uji normalitas menggunakan SPSS menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang didapat sebesar  $0,185 > 0,05$

maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05. Kemudian dari hasil uji multikolinearitas data didapatkan bahwa variabel independen (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan) memiliki nilai *tolerance*



0,461 lebih besar dari 0,100 dan VIF 2,171 kurang dari 10,00, maka asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak memiliki gejala multikolinearitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas (uji park), jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS ditemukan bahwa variabel  $X_1$  (pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan) memiliki nilai signifikansi 0,04 dan variabel  $X_2$  (pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan) memiliki nilai signifikansi 0,80 karena variabel dependen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Uji autokorelasi juga dilakukan untuk menguji data yang diperoleh, berdasarkan ketentuan uji autokorelasi menurut hasil *Durbin Watson* ( $DU < D < 4 - DU =$  tidak terjadi autokorelasi) dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi karena hasil olah data menunjukkan  $1,6413 < 2,169 < 2,3587$ . Setelah terpenuhinya ketentuan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y.

Hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda pada variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan ( $X_1$ ) pertanda positif sebesar 0,405 artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka indeks pembangunan manusia tidak mengalami perubahan sesuai dengan nilai yaitu sebesar 0,405%. Berdasarkan uji koefisien regresi parsial (uji t) pada

variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan juga menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel ( $2,046 < 2,306004135$ ) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 1% ( $0,080 > 1\%$ ). Dari hasil uji t pada variabel dependen ( $X_1$ ) dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota Bandung tahun 2013-2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sidabutar *et al.*, (2020) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia. Alasannya semakin tinggi nilai IPM mengakibatkan semakin rendah tingkat Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan. Hal ini disebabkan IPM mengindikasikan tingkat pembangunan pada pendidikan yang akan mengakibatkan menurunnya tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier berganda pada variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ( $X_2$ ) bertanda positif sebesar 1,597, artinya menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pengeluaran pemerintah bidang kesehatan maka indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 1,758%. Berdasarkan hasil uji koefisien regresi parsial (uji t) pada variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menunjukkan t hitung sebesar 4,271, artinya t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 2,306004135 serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 > 0,05$ ). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Bandung tahun 2013-2020. Hasil ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Suhendi & Astuti (2023) menyatakan pengeluaran ini memiliki

hubungan positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua. Menurutnya, pengeluaran pemerintah yang rendah pada bidang kesehatan membuat kurang memadainya kualitas kesehatan di Provinsi Papua seperti kurangnya infrastruktur yang memadai dan alat pendukung untuk layanan kesehatan. Kurangnya kualitas layanan kesehatan tentu akan membuat kualitas kesehatan masyarakat Papua akan menurun sehingga akan berimbas kepada salah satu indikator penunjang HDI (*Human Development Index*) yaitu berkurangnya angka harapan hidup. Dengan tidak terpenuhinya salah satu indikator penunjang IPM tersebut maka akan membuat tingkat IPM di Provinsi Papua sulit untuk meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji f) diperoleh hasil f hitung lebih besar dari f tabel ( $38,284 > 5,317655072$ ) maka disimpulkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota Bandung tahun 2013-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aulia *et al.*, (2023) di Kota Mataram yang menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM di Kota Mataram tahun 2012-2021. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Ananda *et al.*, (2021) yang menemukan bahwa Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh

dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten Kawasan perbatasan negara Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2019. Peningkatan pendidikan dan kesehatan melalui alokasi pengeluaran pemerintah disuatu negara menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan negara tersebut. (Ananda *et al.*, 2021)

Hasil uji koefisien determinasi (uji  $R^2$ ) memperkuat analisis data menggunakan uji f, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) mampu mempengaruhi variabel terikat (Y), dan ditemukan bahwa variabel  $X_1$  dan  $X_2$  memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 89,2% terhadap variabel Y sedangkan sisanya sebesar 10,8% dipengaruhi variabel lain. Hal ini sesuai dengan kejadian di lapangan bahwa setiap kenaikan anggaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan di setiap tahunnya, maka meningkatkan pula indeks pembangunan manusia di Kota Bandung pada tahun 2013-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aulia *et al.*, (2023) di Kota Mataram yang menunjukkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap IPM di Kota Mataram tahun 2012-2021. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang terjadi pada Kabupaten Kawasan perbatasan negara Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan Ananda *et al.*, (2021), secara parsial ditemukan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan juga berpengaruh terhadap IPM. Dari penelitian yang dilakukan Aulia *et al.*, (2023); Ananda *et al.*, (2021) menunjukkan adanya pengaruh secara simultan



antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM yang sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandung tahun 2013-2022 pada penulisan penelitian ini.

Hasil olah data menunjukkan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Bandung. Ini dikarenakan dana yang memadai untuk sektor pendidikan memungkinkan penyediaan fasilitas pendidikan yang baik, termasuk sarana belajar, buku, dan tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang yang setara bagi semua individu. Pendidikan yang berkualitas juga memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memberikan kesempatan yang setara untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Febrianto & Esther (2023) dana Anggaran Pendidikan mempunyai korelasi yang positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan pengalokasian dana dibidang Pendidikan, lebih banyak orang akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah dan memperoleh pengetahuan yang luas. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia akan berdampak pada peningkatan IPM di Indonesia, yang menunjukkan peran pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. dan juga menurut Paramita (2020) pengalokasian dana, khususnya di bidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Belanja modal ini dapat berupa

pembangunan gedung, sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan bersekolah

Hubungan positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia terjadi, karena dengan naiknya dana anggaran kesehatan, peluang masyarakat untuk hidup sehat dan pengobatan yang layak meningkat, dan pendistribusian kesehatan akan lebih tepat sasaran ke daerah terpencil. Alokasi anggaran yang memadai di bidang kesehatan berkontribusi pada peningkatan harapan hidup, penurunan angka kematian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan yang baik juga memiliki dampak pada produktivitas tenaga kerja, mengurangi absensi kerja akibat penyakit, dan meningkatkan kemampuan kerja secara keseluruhan. Selain itu, investasi dalam kesehatan membantu mengatasi ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan masyarakat yang sehat, produktifitas ekonomi dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan teori *human capital* yang dikemukakan oleh Muslihatinningsih *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa kondisi kesehatan masyarakat merupakan faktor penting tercapainya kesejahteraan hidup, tanpa kesehatan warga negara akan menjadi beban negara. Dengan kondisi kesehatan yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas, yang dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya karena kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, pemerintah juga berkewajiban untuk mengalokasikan tiap pengeluaran sektor kesehatan secara merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang



pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Alokasi anggaran pemerintah dalam pendidikan bertujuan meningkatkan akses pengetahuan dan keterampilan, sementara pengeluaran dalam kesehatan bertujuan memberikan akses layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia di kota Bandung.

### **PENUTUP**

Pengeluaran pemerintah Kota Bandung sektor pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kota Bandung. Sama halnya dengan sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah Kota Bandung sektor kesehatan secara parsial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kota Bandung. Sedangkan secara simultan atau bersamaan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kota Bandung. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandung, maka pemerintah daerah Kota Bandung harus memperhatikan kedua sektor, yang artinya sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan dalam mengupayakan pembangunan manusia di Kota Bandung. Alokasi anggaran pemerintah dalam pendidikan bertujuan meningkatkan akses pengetahuan dan keterampilan, sementara pengeluaran dalam kesehatan bertujuan memberikan akses layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya berkontribusi pada

peningkatan indeks pembangunan manusia di kota Bandung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, I. A., Sukmawati, U. S., & Kidrian, E. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2019. *Cross-Border*, 4(2), h. 429-42.
- Aulia, G. R. N., Daeng, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Pendapatan per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram tahun 2012-2021. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 71-72.
- Aurelya, T., Nurhayati, & Purba, S. F. (2022). Pengaruh Kondisi Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JEMI: Jurnal STIE Ekonomi*, 31(2), 83-92.
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.
- Fajri, R. H. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting Dan Business Journal*, 1(1), 212-222.
- Febrianto, M., & Esther, A. M. (2023). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), h. 2841-2850.
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan sebagai Penunjang Indeks Pembangunan



- Manusia di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 43–50.
- Indonesia, P. P. (2003). Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Database Peraturan BPK. <https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Indonesia, P. P. (2009). Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Database Peraturan BPK. <https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Indonesia, R. (2023). Perkembangan Konsep Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Dari Tahun 1999 Sampai Sekarang. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://doi.org/https://setkab.go.id/perkembangan-konsep-pembinaan-dan-pengawasan-dalam-peraturan-perundang-undangan-dari-tahun-1999-sampai-sekarang/>
- Kaadafi, M., Asnidar, & Miswar. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(2), 123–134.
- Karyono, Y., Tusianti, E., Gunawan, I. G. N. A. R., Nugroho, A., & Clarissa, A. (2020). Indeks Pembangunan Manusia 2020. Badan Pusat Statistik, h.1.
- Mahuze, W., Masinambow, V. A. J., & Lopian, A. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boven Digoel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), 1–12.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 4(2), h. 163-176.
- Muhammad, A. R., & Rahmi, D. (2023). Pengaruh Teknologi, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jabar. *JRIEB: Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 45–52.
- Muslihatinningsih, F., Alvidiar, C., & Wilantari, R. N. (2023). Apakah Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 8(1), h. 138-149.
- Nahwan, D. (2023). Analisis Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Makro di Kota Bandung. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 402–411.
- Nanga, M., & Hudang, A. K. (2023). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2206–2217.
- Nursita, L., & Edy, B. S. (2022). Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan pada Pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), h. 01-15.
- Paramita, A. (2020). Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Makassar. *BIJAC: Bata Ilyas Journal of Accounting*, 1(1), h. 21-32.



- Pramestry, D., & Marseto. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekombis: Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 14–21.
- Rahim, A., Sutanty, M., & Anggita, P. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(3), h. 276-284.
- Rahmah, N., Lukman, Pratiwi, R., & Sufiawan, N. A. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 222–234.
- Safitri, J. (2022). Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pulau Jawa 2016 - 2020. *JIE: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 259–267.
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), h. 86-101.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suhendi, & Astuti, I. P. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan terhadap IPM DI Provinsi Papua tahun 2017-2022. *JIMEA: Jurnal Ilmu MEA (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi)*, 7(2), h. 1676-1694.
- Yuliani, A. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, h.3. <https://doi.org/https://makassarkota.bps.go.id/publication/2023/01/04/3c27026bbe4ac79c9095d89d/indeks-pembangunan-manusia-kota-makassar-2021.html>.

